

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Badan Siber dan Sandi Negara. Pedoman Penanganan Bukti Digital. Jakarta: BSSN, 2019.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2010.
- Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime (4th ed.). London: Academic Press, 2019.
- Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Maras, M.-H. Computer Forensics: Cybercriminals, Laws, and Evidence (2nd ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2016
- M. Irsan Nasution. Forensik Digital dan Pembuktian Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahrus Ali. Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Sacvjo Fath Senajaya, 2026

REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Kompas, 2009.

Syaiful Bakhri. Hukum Pidana: Perspektif, Asas, dan Penerapannya. Yogyakarta: Total Media, 2015.

ARTIKEL / KARYA ILMIAH LAINNYA

Faisol, Rahmad Ready Kurniawan, Ahmad Wahyudin. “Analisis Kekuatan dan Kegunaan Bukti Digital dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ruang Hukum, Vol. 4, No. 1, 2024.

Feby Thealma & Yova Rudelviani. “Digital Forensic Ethical Data Handling in Indonesia.” The Indonesian Journal of Computer Science, Vol. 14, No. 1, 2025.

Moh Riskiyadi. “Investigasi Forensik Terhadap Bukti Digital dalam Mengungkap Cybercrime.” Cyber Security dan Forensik Digital, Vol. 3, No. 2, 2020.

Edwin Setiawan & Hartiwiningsih. “Optimizing the Use of Digital Forensics and Information Technology in Proving Criminal Acts of Electronic Document Forgery in Indonesia.” International Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 2, No. 2, 2025.

Veronika & Binsar H. Simanjuntak. “Implementasi ISO 27037 dalam Pemeriksaan Investigatif dengan Teknik Forensik Digital untuk Memperoleh Bukti Audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).” Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 2024.

INTERNET

BBC Indonesia. “Teknologi Digital dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.” BBC Indonesia, 2023. Diakses 9 Oktober 2025.

CNN Indonesia. "Kejagung Gunakan Digital Forensic untuk Bongkar Kasus Korupsi Besar." CNN Indonesia, 2024. Diakses 10 Oktober 2025.

DetikNews. "Kejaksaan Agung Ungkap Kasus Korupsi Melalui Bukti Digital." Detik.com, 2024. Diakses 9 Oktober 2025.

Hukumonline.com. "Tantangan Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana di Indonesia." Hukumonline.com, 2023. Diakses 8 Oktober 2025.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Pusat Data dan Forensik Digital Bantu Ungkap Kasus Korupsi di Lingkungan Pemerintah." kejaksaan.go.id, 2023. Diakses 10 Oktober 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Optimalisasi Barang Bukti Digital dalam Penanganan Perkara Korupsi." kpk.go.id, 2024. Diakses 11 Oktober 2025.

SUMBER LAIN

Australian Cyber Security Centre. Digital Forensic Standards and Procedures. Canberra: ACSC, 2020

CPIB Singapore. Digital Evidence Handling Framework. Singapore: CPIB, 2019

FBI. Digital Forensics and Data Recovery Annual Report. Washington, DC: FBI Laboratory Division, 2021

ICAC NSW. Guidelines for Handling Electronic Evidence. Sydney: Independent Commission Against Corruption, 2020

Laporan Tahunan 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta: KPK RI, 2024

Press Release Kasus BTS Kominfo - Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2023

TESIS

Dewantara, R. Kekuatan Pembuktian Digital Forensik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2021

Sacvio Fath Senajaya, 2026

REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Turahmi, Vadila. Pembuktian Berdasarkan Laporan Audit Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 683 K/Pid.Sus/2017 dan No. 236 K/Pid.Sus/2014). Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

Aryaguna. Pembuktian dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Teleconference di Masa Pandemi COVID-19. Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

Said Kamaruzzaman. Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/Pid.Sus/2017). Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

Gandhi Muchlisin. Efektivitas Pembuktian Terbalik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

Wijaya, A. Urgensi Standarisasi Digital Forensic di Indonesia. Tesis, Universitas Diponegoro, 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Putusan No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tentang penggunaan alat bukti digital dalam perkara ujaran kebencian.

Putusan No. 314/Pid.Sus/2018/PN.Mnd, tentang keabsahan alat bukti elektronik dan digital forensik dalam perkara penghinaan / pencemaran nama baik.